

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020**

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 31 Desember 2020
Kepala,

drh. Sriyanto, MM, PhD
NIP. 197008152001121001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Desember 2020
Kepala,

drh. Sriyanto, MM, PhD
NIP. 197008152001121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.933.060.564,00 atau mencapai 124,71% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.550.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp22.637.781.106,00 atau mencapai 99,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp22.758.709.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp185.190.821.276,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.207.985.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp180.818.809.068,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp164.027.208,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp76.607.417,00 dan Rp185.114.213.859,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.937.970.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp24.918.789.064,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-22.980.819.064,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp541.210.915,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-22.439.608.149,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp185.703.492.954,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-22.439.608.149,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp32.857.440,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp21.817.471.614,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp185.114.213.859,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	1.550.000.000,00	1.933.060.564,00	124,71	1.589.291.246,00
Jumlah Pendapatan		1.550.000.000,00	1.933.060.564,00	124,71	1.589.291.246,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	5.867.411.000,00	5.849.634.969,00	99,70	5.834.515.176,00
Belanja Barang	B.4.	11.658.584.000,00	11.556.573.314,00	99,13	11.349.074.331,00
Belanja Modal	B.5.	5.232.714.000,00	5.231.572.823,00	99,98	3.802.751.188,00
Jumlah Belanja		22.758.709.000,00	22.637.781.106,00	99,47	20.986.340.695,00

II. NERACA

BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	8.500.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	-42.500,00	0,00
Persediaan	C.1.3.	4.199.527.500,00	4.587.747.069,00
Jumlah Aset Lancar		4.207.985.000,00	4.587.747.069,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	113.177.168.000,00	113.177.168.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	89.934.115.005,00	84.905.083.182,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	63.197.857.000,00	62.601.487.500,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	169.123.000,00	169.123.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-85.659.453.937,00	-79.835.263.654,00
Jumlah Aset Tetap		180.818.809.068,00	181.017.598.028,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	475.270.000,00	315.610.500,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	811.960.520,00	1.030.027.520,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-1.123.203.312,00	-1.205.163.145,00
Jumlah Aset Lainnya		164.027.208,00	140.474.875,00
Jumlah Aset		185.190.821.276,00	185.745.819.972,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	76.607.417,00	42.327.018,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		76.607.417,00	42.327.018,00
Jumlah Kewajiban		76.607.417,00	42.327.018,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	185.114.213.859,00	185.703.492.954,00
Jumlah Ekuitas		185.114.213.859,00	185.703.492.954,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		185.190.821.276,00	185.745.819.972,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	1.937.970.000,00	1.579.739.086,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.937.970.000,00	1.579.739.086,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.839.591.297,00	5.844.558.848,00
Beban Persediaan	D.3.	4.023.549.110,00	949.274.872,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	6.040.676.905,00	5.192.940.590,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	2.046.832.727,00	1.906.891.161,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.078.912.563,00	2.432.906.230,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	5.889.183.962,00	7.164.487.904,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	42.500,00	0,00
JUMLAH BEBAN		24.918.789.064,00	23.491.059.605,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-22.980.819.064,00	-21.911.320.519,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	999.999,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	831.769.778,00	527.435.087,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	291.558.862,00	427.618.205,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		541.210.915,00	99.816.882,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-22.439.608.149,00	-21.811.503.637,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	185.703.492.954,00	230.196.693.373,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-22.439.608.149,00	-21.811.503.637,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	32.857.440,00	-42.517.801.231,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	7.832.440,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0,00	-40.910.743.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	25.025.000,00	-1.607.058.231,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	21.817.471.614,00	19.836.104.449,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	185.114.213.859,00	185.703.492.954,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/ 9/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP), BBUSKP adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian. BBUSKP mempunyai tugas melaksanakan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

Pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2006 tersebut di atas meliputi antara lain pelayanan uji rujukan, uji konfirmasi hasil pemantauan, bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, bimbingan teknis internal dan eksternal pengujian, jasa informasi, jasa tenaga ahli (diantaranya penyusunan PRA, penyusunan modul pelatihan, penyusunan pedoman juklak/juknis, narasumber, instruktur), magang kepada unit pelaksana teknis operasional karantina pertanian di seluruh Indonesia maupun instansi di luar lingkup karantina pertanian. Disamping itu, BBUSKP membangun jaringan kerja dan kerjasama dengan laboratorium yang terkait pada pengujian penyakit hewan, tumbuhan, dan terhadap bahan tambahan (*food additive*), residu obat hewan (*veterinary drugs*), residu antibiotik, bahan kontaminan (biologi dan kimia), toksin atau organisme penyebab penyakit pada pangan (*disease-causing organisms in food*), serta residu pestisida.

Pelaksanaan tupoksi BBUSKP untuk pelayanan pengujian laboratorium telah menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2008 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP-390-IDN pada tanggal 16 Juni 2008. Untuk menyempurnakan sistem manajemen mutu laboratorium perlu dilakukan harmonisasi terhadap sistem mutu pelayanan sesuai SNI ISO 9001:2008.

Penyempurnaan sistem manajemen mutu pelayanan BBUSKP ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem manajemen pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan (*good, clean, and transparent governance*), yang pada akhirnya menjadikan BBUSKP dengan profil yang akuntabel.

Dalam upaya menjadikan BBUSKP sebagai instansi pemerintah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel yang sinkron dengan tupoksi, maka perlu ditetapkan visi dan misi sebagai arah dan langkah tahapan yang perlu dituangkan dalam kebijakan mutu dan dilaksanakan dalam program BBUSKP serta penetapan sasaran mutu yang pencapaiannya melalui kegiatan tahunan.

Visi BBUSKP:

Menjadi *Pusat Standar Pengujian Penyakit Karantina Yang Terpercaya Tahun 2020*

Motto BBUSKP:

“Hasil Uji Yang Memuaskan, Dengan Prioritas Tepat Dan Teliti” (*Test Inlier, Priority In Precise And Accuracy*)

Misi BBUSKP:

1. Melakukan penyusunan standarisasi laboratorium uji karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
2. Melakukan pengkajian pengembangan kompetensi, teknik dan metoda karantina pertanian dan keamanan hayati;
3. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengujian, dan penerapan pengawasan serta pengendalian sistem manajemen mutu pelayanan karantina dan laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
4. Melakukan kerjasama dan pengembangan jejaring laboratorium uji tingkat nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kompetensi laboratorium sebagai penyedia sampel uji standar (*provider*) dalam pelaksanaan uji profesiensi.

Janji Layanan BBUSKP:

“Memberikan Pelayanan Yang Cepat, Tepat, Akurat, Dan Akuntabel

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Sensor Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
Jumlah Pendapatan	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.335.607.000,00	5.615.411.000,00
Belanja Lembur	300.000.000,00	252.000.000,00
Belanja Barang Operasional	1.725.262.000,00	1.795.686.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.806.794.000,00	1.656.762.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.153.800.000,00	2.439.314.000,00
Belanja Jasa	3.222.700.000,00	2.582.300.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.034.208.000,00	2.081.384.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.269.000.000,00	1.103.138.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.618.620.000,00	4.503.689.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.800.000.000,00	569.025.000,00
Belanja Modal Lainnya	160.000.000,00	160.000.000,00
Jumlah Belanja	25.425.991.000,00	22.758.709.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.933.060.564,00 atau mencapai 124,71% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.550.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	999.999,00	0,00

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	1.550.000.000,00	1.929.470.000,00	124,48
Pendapatan Lain-lain	0,00	2.590.565,00	0,00
Jumlah	1.550.000.000,00	1.933.060.564,00	124,71

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 21,63% dibandingkan TA 2019. Pendapatan berasal dari :

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 999.999,- berasal dari pelepasan Peralatn dan Mesin
2. Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan TA 2020 senilai Rp. 1.929.470.000, berasal dari 4.505 Sertikat Hasil Pengujian Laboratorium KH, KT, dan Kehati. Pendapatan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 yang mengeluarkan 4.124 Sertifikat Hasil Pengujian, keniakn ini terjadi karena tingginya permohonan pengjuain sarang burung wallet pada Laboratorium Karantina Hewan.
3. Pendapatan lain lain sebesar Rp. 2.590.565,- berasal dari pengembalian Tunjangan Umum bulan November dan Desember 2019 dari 7 orang pegawai.

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	999.999,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	969.086,00	- 100,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	1.929.470.000,00	1.578.770.000,00	22,21
Pendapatan Lain-lain	2.590.565,00	9.552.160,00	-72,88
Jumlah	1.933.060.564,00	1.589.291.246,00	21,63

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp22.637.781.106,00 atau 99,47% dari anggaran belanja sebesar Rp22.758.709.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	5.867.411.000,00	5.850.015.059,00	99,70
Belanja Barang	11.658.584.000,00	11.556.573.314,00	99,13
Belanja Modal	5.232.714.000,00	5.231.572.823,00	99,98
Total Belanja Kotor	22.758.709.000,00	22.638.161.196,00	99,47
Pengembalian Belanja		-380.090,00	0.00
Total Belanja	22.758.709.000,00	22.637.781.106,00	99,47

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,87% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Hal ini disebabkan adanya penambahan pagu di Tahun 2020 terutama di kelompok Belanja Modal

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	5.849.634.969,00	5.834.515.176,00	0,26
Belanja Barang	11.556.573.314,00	11.349.074.331,00	1,83
Belanja Modal	5.231.572.823,00	3.802.751.188,00	37,57
Total Belanja	22.637.781.106,00	20.986.340.695,00	7,87

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.849.634.969,00 dan Rp5.834.515.176,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,26% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pembayaran Gaji ke 13 dan ke 14 pada bulan Mei dan Agustus 2020
2. Adanya mutasi pegawai pindah
3. Terdapat kenaikan pangkat pegawai baik reguler maupun fungsional
4. Terdapat Kenaikan gaji berkala pegawai

Terdapat pengembalian belanja pegawai senilai Rp. 380.090, tercatat sebagai pengembalian atas tunjangan pembulatan gaji PNS dari pembayaran kekurangan belanja pegawai a.n drh. Retno, seharusnya dicatat sebagai pengembalian tunjangan umum PNS senilai Rp. 380.000 dan Pengembalian pembulatan gaji PNS senilai Rp. 90,-.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.599.029.059,00	5.542.170.544,00	1,03
Belanja Lembur	250.986.000,00	299.979.000,00	-16,33
Jumlah Belanja Kotor	5.850.015.059,00	5.842.149.544,00	0,13
Pengembalian Belanja Pegawai	-380.090,00	-7.634.368,00	-95,02
Jumlah Belanja	5.849.634.969,00	5.834.515.176,00	0,26

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.556.573.314,00 dan Rp11.349.074.331,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,83% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja barang mengalami kenaikan sebesar 1,83% berasal dari kenaikan pada belanja penanganan covid-19 untuk seluruh pegawai BBUSKP.
2. Kenaikan belanja persediaan barang konsumsi, yaitu persediaan bahan Laboratorium.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.792.328.307,00	1.409.460.978,00	27,16
Belanja Barang Non Operasional	1.649.710.969,00	1.463.938.098,00	12,69
Belanja Barang Persediaan	2.434.475.190,00	1.774.614.950,00	37,18
Belanja Jasa	2.554.313.558,00	2.361.262.914,00	8,18

Belanja Pemeliharaan	2.046.832.727,00	1.906.891.161,00	7,34
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.078.912.563,00	2.434.239.430,00	-55,68
Jumlah Belanja Kotor	11.556.573.314,00	11.350.407.531,00	1,82
Pengembalian Belanja Barang	0,00	-1.333.200,00	-100,00
Jumlah Belanja	11.556.573.314,00	11.349.074.331,00	1,83

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.231.572.823,00 dan Rp3.802.751.188,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 37,57% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja modal mengalami kenaikan disebabkan adanya pengadaan peralatan teknis dan laboratorium, Peralatan dan Mesin, Belanja modal lainnya, dan Gedung dan bangunan.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.503.043.823,00	3.643.593.688,00	23,59
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	568.869.500,00	99.731.500,00	470,40
Belanja Modal Lainnya	159.659.500,00	59.426.000,00	168,67
Jumlah Belanja Kotor	5.231.572.823,00	3.802.751.188,00	37,57
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	5.231.572.823,00	3.802.751.188,00	37,57

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.503.043.823,00 dan Rp3.643.593.688,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 23,59% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan untuk pembelian Peralatan Teknis dan Laboratorium terdiri dari Pengadaan Alat Laboratorium, Pengadaan Peralatan Mesin Pemeliharaan Akreditasi, Pengadaan spare part laboratorium, Pengadaan alat lab khusus dan pengadaan meubelair.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.503.043.823,00	3.643.593.688,00	23,59
Jumlah Belanja Kotor	4.503.043.823,00	3.643.593.688,00	23,59
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.503.043.823,00	3.643.593.688,00	23,59

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp568.869.500,00 dan Rp99.731.500,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 470,40% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Realisasi belanja modal untuk gedung dan bangunan berasal dari penambahan Gedung pelayanan kantor pelayanan

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	568.869.500,00	99.731.500,00	470,40
Jumlah Belanja Kotor	568.869.500,00	99.731.500,00	470,40
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	568.869.500,00	99.731.500,00	470,40

B.5.3. BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp159.659.500,00 dan Rp59.426.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 168,67% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Realisasi belanja lainnya mengalami kenaikan berasal dari penambahan realiasi Penambahan nilai fisik lainnya, atau pengadaan software.

Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	159.659.500,00	59.426.000,00	168,67
Jumlah Belanja Kotor	159.659.500,00	59.426.000,00	168,67
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	159.659.500,00	59.426.000,00	168,67

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.500.000,00 dan Rp0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.500.000,00	0,00
Jumlah	8.500.000,00	0,00

Piutang PNPB tersebut berasal dari tagihan billing bulan Desember yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun 2020, dan berasal dari 2 pengguna jasa yaitu:

1. Billing a.n PT Mahkota dengan nilai Rp. 6175.000,-
2. Billing a.n PT Mahkota dengan nilai Rp. 2.325.000,-

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-42.500,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	8.500.000,00	0,5%	42.500,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.199.527.500,00 dan Rp4.587.747.069,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	4.199.527.500,00	4.587.747.069,00
Jumlah	4.199.527.500,00	4.587.747.069,00

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019	4.587.747.069,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	2.434.475.190,00
Penyesuaian nilai persediaan	535.920.191,00
Transfer Masuk	663.234.000,00
Koreksi tambah	1.700.160,00
Mutasi Kurang	
Pemakaian	-4.023.549.110,00
Saldo per 30 September 2020	4.199.527.500,00

Transaksi Pembelian pada Persediaan antara lain :

- Kwitansi No.27/kw/paj/01/2020, Tanggal 19 Januari 2020 sesuai dengan SP2D No. 201391303000585 Tanggal 20 Januari 2020 dengan Nilai Rp.25.125.100,-
- Kwitansi No.85/kw/paj/04/2020 Tanggal 1 April 2020 sesuai SP2D No. 201391303014016 tanggal 2 April 2020 senilai Rp. 25.420.450,-
- Kwitansi No.0466/IV/2020/FP tanggal 14 April 2020 sesuai SP2D No. 201391302011085 tanggal 14 April 2020 senilai Rp. 33.129.800,-
- Kwitansi No. 113/kwt/paj/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan SP2D No. 201391303019744 tanggal 27 Mei 2020 senilai Rp. 6.000.000,-
- SPP/SPM No. 257 dengan SP2D No.201391302017096 tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp. 179.656.400,-

- f. SPM/SPP No. 240 dengan SP2D No. 201391302015834 tanggal 9 juni 2020 senilai Rp. 12.000.000,-
- g. SPP/SPM No.346 dengan SP2D No. 201391302025906 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 1.344.238.500,-
- h. Terdapat penyesuaian nilai persediaan senilai Rp. 1.385.837.579,- yang dikelompokkan menjadi Alat/Bahan Laboratorium yang digunakan untuk kegiatan kantor lainnya karena pada kontrak pengadaan lelang cepat belum dilampirkan rincian harga per barang, nilai kontrak adalah harga keseluruhan barang , sambil menunggu pihak penyedia melampirkan rincian harga barang tersebut.
- i. SPP/SPM No. 391 tanggal 19 Oktober 2020 senilai Rp. 49.894.915,-
- j. SPM No.403 tanggal 21 Oktober 2020 senilai Rp. 8.954.000,-
- k. SPM No. 404 tanggal 21 Oktober 2020 dengan nilai Rp. 13.717.000,-
- m. SPM/SPP No. 381 tanggal 8 Oktober 2020 dengan nilai Rp. 242.000,-
- n.SPM /SPP No. 380 tanggal 8 Oktober 2020 dengan nilai Rp. 16.060.000,-
- o.SPM/SPP No. 458 tanggal 23 Oktober 2020 dengan nilai Rp. 151.155.840,-
- p. SPM/SPP No. 441 tanggal 16 November 2020 dengan nilai Rp. 45.349.700,-
- q. SPM/ SPP No. 442 tanggal 16 November 2020 dengan nilai Rp. 49.852.000,-
- r. Terdapat reansfer masuk dari BBKP Tanjung Priok senilai Rp. 663.234.000 dengan BAST No. /BAST/PL.210/K.7.A/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Rincian Pemakaian persediaan antara lain:

- a. BA Opname Fisik No.01/Ba.Opname/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 dengan Nilai Rp.198.974.848 , -
- b. BA Opname Fisik No.02/Ba.Opname/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 dengan Nilai Rp. 93.677.260,-
- d. BA Opname Fisik No. 03/BA.Opname/03/2020 tanggal 29 Maret 2020 dengan nilai Rp. 17.032.950,-
- e. BA Opname Fisik No.04/BA.Opname/04/2020 tanggal 30 April 2020 dengan Nilai Rp. 64.575.246,-
- f. BA Opname Fisik No.05/BA.Opname/05/2020 tanggal 31 Mei 2020 dengan Nilai Rp. 17.692.575,-
- g. BA Opname Fisik No.06/BA.Opname/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan Nilai Rp. 161.037.627,-
- h. BA Opname Fisik No. 07/BA.Opname/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 dengan nilai Rp. 391.821.713,-
- i. BA Opname Fisik No. 08/BA.Opname/08/2020 tanggal 30 Agustus 2020 dengan nilai Rp. 189.784.600,-

- j. BA Opname Fisik No. 09/BA.Opname/08/2020 tanggal 30 September 2020 dengan nilai Rp. 163.106.300,-
- k. BA Opname Fisik No. 10/BA.Opname/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 dengan nilai Rp. 1.608.599.684,-
- l. BA Opname Fisik No. 11/BA.Opname/10/2020 tanggal 30 November 2020 dengan nilai Rp. 467.388.691,-
- m. BA Opname Fisik No. 12/BA.Opname/10/2020 tanggal 31 Desember 2020 dengan nilai Rp. 577.414.681,-

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp113.177.168.000,00 dan Rp113.177.168.000,00.

Sesuai dengan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN No. 594/Rev/WKN.07/KNL.02/2019 Tanggal 23 Desember 2019.

Rincian Nilai Tanah per 31 Desember 2020

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	3.830,00m2	Jl. Pemuda No. 64 Kav 16-17 Rt., Pulo gadung	113.177.168.000,00
Jumlah			113.177.168.000,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp89.934.115.005,00 dan Rp84.905.083.182,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	84.905.083.182,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.405.656.100,00
Transfer Masuk	565.988.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.928.416.200,00
Pengembangan Nilai Aset	168.971.523,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-40.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	89.934.115.005,00

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-80.266.204.833,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	9.667.910.172,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp. 1.558.905.400,00 berasal dari:

1. Transaksi Pembelian satu unit Kendaraan Roda 4 Station Wagon senilai Rp. 254.000.000,-
2. Transaksi Pembelian Pengadaan Alat Komunikasi senilai Rp. 84.000.000,- dengan rincian sebagai berikut
 - a. 6 Unit Televisi dengan nilai Rp. 82.000.000,-
 - b. 1 Unit Voice Recorder dengan nilai 2.000.000,
3. Transaksi Pengadaan Palng Pintu Otomatis dengan nilai Rp.89.870.000,-
4. Pembelian Peralatan dan Mesin dalam rangka Pengadaan Alat Laboratorium 1 Unit Inkubator senilai Rp. 171.600.000,-
5. Pembelian 1 unit Acces Control Laboratorium senilai Rp. 77.220.000,-
6. Pembelian 3 unit lensa kamera senilai Rp. 31.350.000,-
7. Pembelian 25 buah alat laboratorium berupa micro pipetes senilai Rp. 149.545.000,-
8. Pembelian 1 unit Overhead Projector dengan nilai Rp. 11.226.400,-
9. Pembelian 3 unit AC Split dengan nilai Rp. 24.486.000
10. Pembelian 2 unit refrigerator dengan nilai Rp. 12.210.000,-
11. Pembelian 6 buah PC. Unit dengan nilai Rp. 69.135.000,-
12. Pembelian 3 buah Laptop dengan nilai Rp. 34.155.000,-
13. Pembelian 6 buah printer dengan nilai Rp. 23.364.000,-
14. Terdapat Transfer masuk dari BBKP Tanjung Priok berupa 1 unit mobil dengan nilai Rp. 251.000.000,- sesuai BAST No. 926/BAST/PL.210/K.7.A/01/2020 tanggal 2 Jaanuari 2020
15. Terdapat transfer masuk dari BBKP Tanjung Priok berupa 2 unit laptop dengan nilai Rp. 39.244.000,- dengan BAST No. 906/BAST/PL.210/K.7.A/01/2020 Tanggal 13 Januari 2020.
16. Terdapat transfer masuk dari BKP Kelas I Cilegon senilai Rp. 236.500.000,- dengan BAST No. 990/PL.310/K32.C/06/2020 Tanggal 4 Juni 2020.
17. Terdapat Pengembangan Nilai Aset senilai Rp. 168.971.523 merupakan pengadaan spare part laboratorium kehati.

Mutasi kurang berasal dari transfer keluar berupa alat laboratorium sensor proximity ke BKP Kelas I Cilegon senilai Rp. 40.000.000,- sesuai dengan BAST No. 757/PL.310/K.5.A/06/2020 Tanggal 3 Juni 2020.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp63.197.857.000,00 dan Rp62.601.487.500,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	62.601.487.500,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	27.500.000,00
Reklasifikasi Masuk	128.452.000,00
Pengembangan Nilai Aset	568.869.500,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	-128.452.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	63.197.857.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-5.370.067.370,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	57.827.789.630,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Saldo awal berasal dari Nilai Bangunan Gedung Ibadah Semi Permanen sesuai dengan SKTJM No. 1112a/TU.210/K.5.A/09/2020 tanggal 1 September 2020
2. Penambahan Atap Parkir Kendaraan Roda 2 dan Perencanaan Pengembangan Gedung Kantor senilai Rp. 92.055.000
3. Rehab atap gedung laboratorium karantina hewan senilai Rp. 197.450.000
4. Pengadaan portal elektronik senilai Rp. 89.870.000,-
5. Perbaikan Atap Plafon Ruang seminar KT senilai Rp. 79.937.000,-

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp169.123.000,00 dan Rp169.123.000,00.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-85.659.453.937,00 dan Rp-79.835.263.654,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	89.934.115.005,00	-80.266.204.833,00	9.667.910.172,00
2.	Gedung dan Bangunan	63.197.857.000,00	-5.370.067.370,00	57.827.789.630,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	169.123.000,00	-23.181.734,00	145.941.266,00
Akumulasi Penyusutan		153.301.095.005,00	-85.659.453.937,00	67.641.641.068,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp475.270.000,00 dan Rp315.610.500,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	315.610.500,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	99.660.000,00
Pengembangan Nilai Aset	59.999.500,00
Saldo per 31 Desember 2020	475.270.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-311.242.792,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	164.027.208,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah berupa:

1. Terdapat pengadaan software SILAKU yang merupakan pengganti aplikasi SIMLAB senilai Rp. 99.660.000,-
2. Terdapat pengadaan software QIMS merupakan aplikasi terkait panduan Mutu

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	475.270.000,00
Jumlah	475.270.000,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp811.960.520,00 dan Rp1.030.027.520,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	1.030.027.520,00
Mutasi Kurang	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-218.067.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	811.960.520,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-811.960.520,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Terdapat usulan barang rusak berat (BMN yang dihentikan) dan sudah dilakukan pelelangan dengan risalah lelang dengan Nomor.572/26/2020 tanggal 24 November 2020.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-1.123.203.312,00 dan Rp-1.205.163.145,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	475.270.000,00	-311.242.792,00	164.027.208,00
2.	Aset Lain-lain	811.960.520,00	-811.960.520,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		1.287.230.520,00	-1.123.203.312,00	164.027.208,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp76.607.417,00 dan Rp42.327.018,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	10.043.672,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	76.607.417,00	32.283.346,00
Jumlah	76.607.417,00	42.327.018,00

Belanja barang yang masih harus dibayar merupakan tagihan langganna listrik bulan desember yang belum dibayar.

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp185.114.213.859,00 dan Rp185.703.492.954,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.937.970.000,00 dan Rp1.579.739.086,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	969.086,00	-100,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1.937.970.000,00	1.578.770.000,00	22,75
Jumlah	1.937.970.000,00	1.579.739.086,00	22,68

Terdapat kenaikan pada Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan karena meningkatnya permohonan pengujian sarang burung wallet .

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.839.591.297,00 dan Rp5.844.558.848,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.770.327.450,00	3.817.442.210,00	-1,23
Beban Pembulatan Gaji PNS	53.642,00	60.364,00	-11,14
Beban Tunj. Anak PNS	79.927.044,00	79.331.832,00	0,75
Beban Tunj. Beras PNS	183.150.180,00	187.640.220,00	-2,39
Beban Tunj. Fungsional PNS	527.030.000,00	471.270.000,00	11,83
Beban Tunj. PPh PNS	24.723.351,00	23.712.442,00	4,26
Beban Tunj. Struktural PNS	118.705.000,00	120.370.000,00	-1,38

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	248.764.630,00	245.054.780,00	1,51
Beban Tunjangan Umum PNS	40.120.000,00	64.705.000,00	-38,00
Beban Uang Lembur	250.986.000,00	299.979.000,00	-16,33
Beban Uang Makan PNS	595.804.000,00	534.993.000,00	11,37
Jumlah	5.839.591.297,00	5.844.558.848,00	-0,09

Kenaikan yang terjadi pada kelompok belanja pegawai disebabkan antara lain :

1. Adanya Mutasi pegawai pindah
2. Belanja Gaji Bulan ke-14/ THR pegawai dibayarkan pada bulan Mei dan Gaji ke-13 pada bulan Agustus
3. Kenaikan pangkat, fungsional dan gaji berkala

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.023.549.110,00 dan Rp949.274.872,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	4.023.549.110,00	949.274.872,00	323,86
Jumlah	4.023.549.110,00	949.274.872,00	323,86

Terdapat kenaikan pada beban persediaan karena tingginya pengajuan permohonan pengujian laboratorium sarang burung walis, sehingga pemakaian persediaan meningkat.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.040.676.905,00 dan Rp5.192.940.590,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1.649.710.969,00	1.445.938.098,00	14,09
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	102.660.750,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	243.740.000,00	218.840.000,00	11,38
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	18.000.000,00	-100,00
Beban Jasa Lainnya	1.296.377.024,00	979.721.194,00	32,32
Beban Jasa Profesi	244.300.000,00	422.900.000,00	-42,23
Beban Keperluan Perkantoran	1.167.434.557,00	947.726.478,00	23,18
Beban Langganan Air	70.584.620,00	45.974.660,00	53,53
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	51.507.000,00	60.391.300,00	-14,71
Beban Langganan Listrik	863.826.753,00	721.257.970,00	19,77
Beban Langganan Telepon	33.642.232,00	47.296.390,00	-28,87
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	260.832.000,00	218.592.000,00	19,32
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17.661.000,00	24.302.500,00	-27,33
Beban Sewa	38.400.000,00	42.000.000,00	-8,57
Jumlah	6.040.676.905,00	5.192.940.590,00	16,32

Terdapat beberapa kenaikan pada kelompok belanja barang dan jasa karena naiknya pagu terutama untuk belanja bahan persediaan yang disediakan untuk bahan pengujian sarang burung walis dan belanja operasional untuk penanganan Covid-19.

Untuk belanja penanganan Covid -19 terdapat anggaran senilai Rp102.660.750 dengan rincian sebagai berikut :

1. Transaksi senilai Rp. 19.860.750 adalah pembayaran untuk pelaksanaan rapid test Covid-19 dengan kuitansi No.. 035/PPK-K/06/2020 tanggal 26 Juni 2020
2. Transaksi senilai Rp. 20.000.000 untuk pembelian vitamin dan desinfektan dengan nomor kuitansi No. 88/KWT/PAJ/04/2020 Tanggal 13 April 2020.
3. Transaksi Biaya komunikasi dengan No.SPM 371 tanggal 21 September 2020 dengan nilai Rp. 46.900.000,-
4. Transaksi biaya komunikasi dengan No. SPM 438 tanggal 13 November 2020 dengan nilai Rp. 15.900.000,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.046.832.727,00 dan Rp1.906.891.161,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	670.616.780,00	576.643.350,00	16,30
Beban Pemeliharaan Jaringan	148.018.300,00	89.990.000,00	64,48
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.228.197.647,00	1.240.257.811,00	-0,97
Jumlah	2.046.832.727,00	1.906.891.161,00	7,34

Beban pemeliharaan mengalami kenaikan karena adanya kenaikan pagu pada belanja pemeliharaan karena adanya penambahan peralatan mesin dan gedung yang baru.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.078.912.563,00 dan Rp2.432.906.230,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	385.141.203,00	1.505.135.143,00	-74,41
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	57.750.000,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.450.000,00	51.450.000,00	-34,99
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.328.000,00	31.800.000,00	-42,36

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	584.243.360,00	844.521.087,00	-30,82
Jumlah	1.078.912.563,00	2.432.906.230,00	-55,65

Terdapat beban perjalanan dinas penanganan pandemi Covid 19 senilai Rp. 57.750.000 untuk pembayaran transportasi WFO pegawai selama bulan April dan Mei 2020.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.889.183.962,00 dan Rp7.164.487.904,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	136.107.167,00	88.793.417,00	53,29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.477.061.203,00	1.541.457.414,00	-4,18
Beban Penyusutan Jaringan	4.394.919,00	4.394.919,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.271.620.673,00	5.529.842.154,00	-22,75
Jumlah	5.889.183.962,00	7.164.487.904,00	-17,80

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp42.500,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	42.500,00	0,00	0,00
Jumlah	42.500,00	0,00	0,00

Penyisihan piutang tak tertagih berasal dari Piutang PNB PT. Mahkota dengan nilai Piutang Rp. 8.500.000,-

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-291.558.862,00	-427.618.205,00	-31,82
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	829.179.213,00	520.438.227,00	59,32
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	999.999,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.996.100,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.590.565,00	760,00	340.763,82
Jumlah	541.210.915,00	99.816.882,00	442,20

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp185.703.492.954,00 dan Rp230.196.693.373,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-22.439.608.149,00 dan Rp-21.811.503.637,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp32.857.440,00 dan Rp-42.517.801.231,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.832.440,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-40.910.743.000,00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25.025.000,00 dan Rp-1.607.058.231,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
---------------	--------------------------------

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-2.475.000,00
Gedung dan Bangunan	27.500.000,00
Jumlah	25.025.000,00

Nilai koreksi Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari Transaksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan Tempat Ibadah non Permanen. Dengan SKTJM No. 1112.a/TU.210/K.5.A.09/2020 tanggal 1 September 2020.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp21.817.471.614,00 dan Rp19.836.104.449,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	22.637.781.106,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.933.060.564,00
Transfer Keluar	-37.500.000,00
Transfer Masuk	1.150.251.072,00
Jumlah	21.817.471.614,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-1.933.060.564,00 sedangkan DKEL sebesar Rp22.637.781.106,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.150.251.072,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2020.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
----	-------	--------------	-------

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120100412126000KD	663.234.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	018120100412126000KD	329.488.000,00
3.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018120100412126000KD	-62.078.071,00
4.	Peralatan dan Mesin	018122900499480000KD	236.500.000,00
5.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018122900499480000KD	-16.892.857,00
Jumlah			1.150.251.072,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-37.500.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2020.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018122900499480000KD	-40.000.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018122900499480000KD	2.500.000,00
Jumlah			-37.500.000,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp185.114.213.859,00 dan Rp185.703.492.954,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah :

Bank BNI Cabang Rawamangun No.Rek 0012957783 a.n. Bendahara Pengeluaran Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

Bank Mandiri KCP Rawamangun Balai Pustaka No.Rek 006-00-0688876-6 a.n. Bendahara Penerimaan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, namun sejak bulan September 2015, rekening tersebut telah di tutup dikarenakan bahwa setiap satker yang menyetor jasa pengujian bisa dilakukan dengan kode billing dan tidak lagi disetor melalui rekening bendahara penerima.

2. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, DIPA yang ada di Satker Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian telah direvisi sebanyak 3 kali.